



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Pedoman Tindak Lanjut Laporan Kekerasan di Kampus





#RuangAman Publication Series #1

Pedoman Tindaklanjut Laporan Kekerasan di Kampus

**Khaerul Umam Noer, Ati Kusmawati,
Murniati Agustian**

Publikasi ini merupakan bagian dari penelitian berjudul Analisis Implementasi Permendikbudristek 30/2021 dalam Mendorong Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi: Aspek Kebijakan dan Sosiokultural yang didanai oleh Hibah Katalis Kemendikbudristekdikti Tahun 2024. Dengan nomor SK 0639/E5/PG.02.00/2024 tertanggal 23 Juli, kontrak antara Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat dan LLDIKTI 3 Nomor 058/E5/PG.02.00/PL.BATCH.2/2024 tertanggal 1 Agustus, Kontrak antara LLDIKTI 3 dan UMJ Nomor 1087/LL3/AL.04/2024 tertanggal 8 Agustus, dan Kontrak antara UMJ dan Peneliti Nomor 116/R-UMJ/VIII/2024 tertanggal 12 Agustus.

.Tim mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, LLDIKTI 3, Rektor UMJ, LPPM UMJ, Yayasan Attaqwa, dan Droupadi atas bantuan dan fasilitasnya.

(c) September 2024. BookCode 001/REF.ANAC/2024

ATIQQH NOER ALIE CENTER

Office: Summarecon Tower 7th FL., Summarecon Boulevard, Kota Bekasi
sekretariat@atiqqhcenter.id / perguruan@attaqwa.or.id

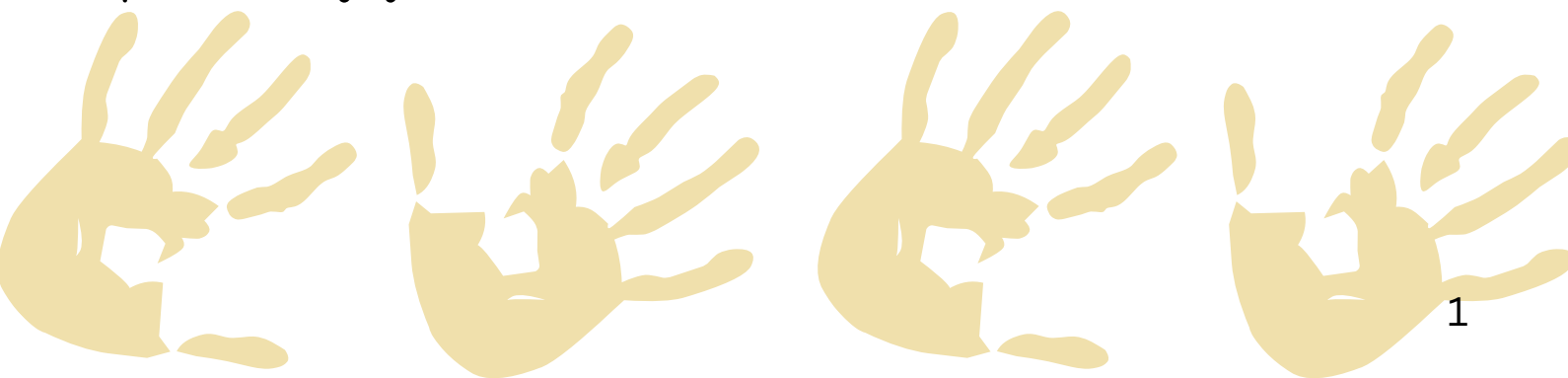
1 Penerimaan Laporan dan Verifikasi Awal

Langkah pertama dalam menangani laporan kekerasan di kampus adalah menerima laporan secara resmi. Laporan bisa berasal dari mahasiswa, dosen, staf, atau pihak eksternal yang mengetahui kejadian kekerasan. Penerimaan laporan ini harus dilakukan dengan menghormati kerahasiaan pihak pelapor. Hal ini untuk memastikan bahwa pelapor merasa aman dan terlindungi dari potensi tindakan balas dendam.

Setelah laporan diterima, penting untuk segera memverifikasi kebenaran dasar dari informasi yang dilaporkan. Verifikasi ini melibatkan pengumpulan informasi awal dari pelapor, termasuk identifikasi korban dan pelaku, tempat kejadian, waktu, serta kronologi singkat dari insiden kekerasan tersebut. Verifikasi dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara mencari kebenaran dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

Jika diperlukan, pihak kampus bisa langsung menugaskan petugas atau komite khusus untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan tersebut. Verifikasi ini bertujuan untuk menentukan apakah insiden tersebut termasuk dalam kategori kekerasan yang diatur oleh peraturan kampus atau peraturan hukum pidana. Proses ini juga menjadi dasar untuk menentukan apakah perlu dilanjutkan ke langkah investigasi yang lebih mendalam.

Sangat penting untuk menghindari pembuatan asumsi tanpa dasar yang cukup selama tahap awal ini. Semua pihak yang terlibat, termasuk pelapor dan terlapor, harus diperlakukan dengan hormat dan adil, tanpa prasangka. Keputusan untuk melanjutkan kasus ke langkah selanjutnya harus didasarkan pada bukti awal yang kuat.



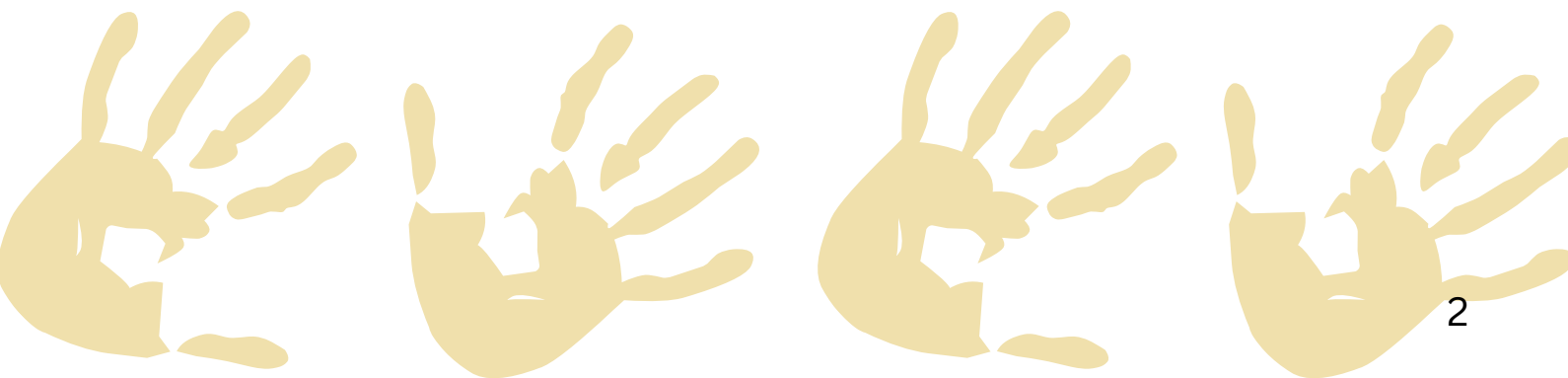
2 Pembentukan Tim Khusus Investigasi

Setelah verifikasi awal dilakukan dan ada indikasi kuat bahwa insiden tersebut adalah kasus kekerasan, kampus perlu segera membentuk tim investigasi. Tim ini harus terdiri dari personel yang kompeten dan independen, termasuk pihak-pihak dari divisi keamanan, konseling mahasiswa, serta perwakilan hukum kampus. Peran tim investigasi adalah untuk mengumpulkan lebih banyak fakta dan bukti terkait insiden kekerasan tersebut.

Pembentukan tim investigasi juga harus mempertimbangkan aspek integritas dan keadilan. Tim tidak boleh melibatkan individu yang memiliki potensi konflik kepentingan dengan pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, tim harus diberi mandat yang jelas, termasuk wewenang untuk mengakses bukti-bukti dan melakukan wawancara dengan saksi-saksi terkait.

Investigasi harus dilakukan dengan cermat dan menyeluruh, memastikan bahwa semua sudut pandang dan bukti yang relevan diperhitungkan. Tim investigasi juga harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses ini untuk melindungi integritas penyelidikan serta hak-hak pihak yang terlibat.

Dalam investigasi, penting untuk mengadopsi pendekatan yang objektif dan berimbang. Semua fakta yang ditemukan harus dipertimbangkan secara adil dan tidak ada pihak yang disalahkan atau dipertahankan tanpa dasar hukum yang kuat. Transparansi dalam proses juga perlu dijaga untuk memastikan kepercayaan semua pihak terhadap hasil akhir investigasi.



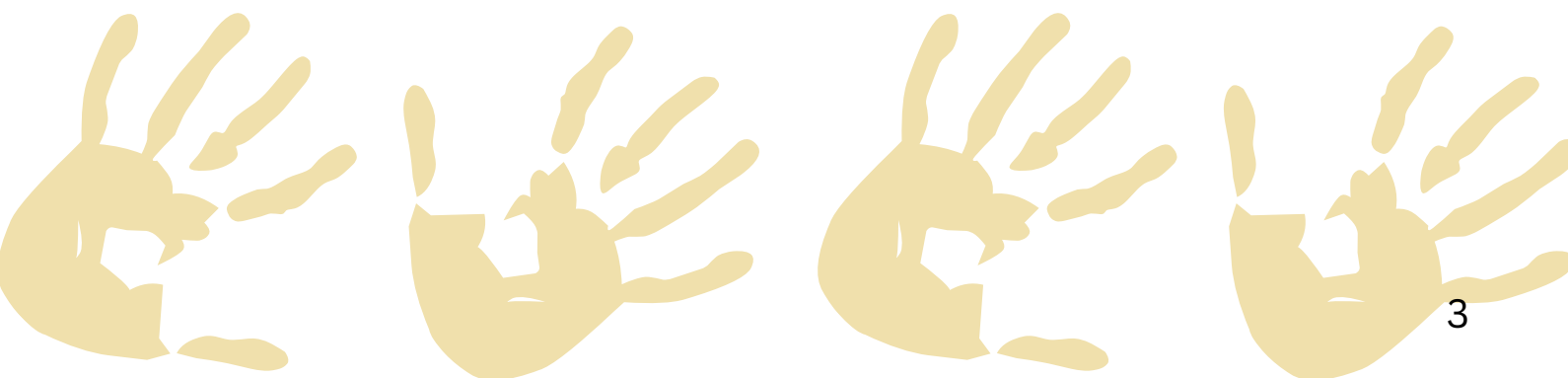
3 Pengumpulan Bukti dan Wawancara Saksi

Setelah tim investigasi terbentuk, langkah berikutnya adalah melakukan pengumpulan bukti. Bukti dapat berupa dokumentasi fisik seperti rekaman CCTV, foto, atau dokumen tertulis, serta keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui kejadian. Bukti ini sangat penting dalam membangun kronologi kejadian dan mengidentifikasi pelaku maupun korban dengan tepat.

Wawancara dengan saksi-saksi yang relevan juga harus dilakukan secara hati-hati dan mendalam. Dalam hal ini, penting bagi tim investigasi untuk menjaga suasana wawancara agar saksi merasa nyaman dan tidak tertekan. Penggunaan teknik wawancara yang sesuai akan membantu mengungkapkan fakta-fakta yang mungkin sulit diungkap dalam kondisi yang tidak mendukung.

Setiap wawancara harus didokumentasikan secara rinci, baik dalam bentuk catatan tertulis maupun rekaman audio atau video, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini untuk memastikan bahwa kesaksian tidak berubah atau disalahartikan di kemudian hari. Tim investigasi juga harus siap untuk menghadapi kesulitan jika ada saksi yang enggan memberikan keterangan karena alasan ketakutan atau tekanan.

Proses pengumpulan bukti dan wawancara saksi harus diprioritaskan agar dilakukan secepat mungkin setelah insiden terjadi. Hal ini bertujuan untuk mencegah hilangnya bukti atau perubahan ingatan saksi. Semua bukti yang terkumpul harus dianalisis secara mendalam sebelum membuat kesimpulan lebih lanjut.



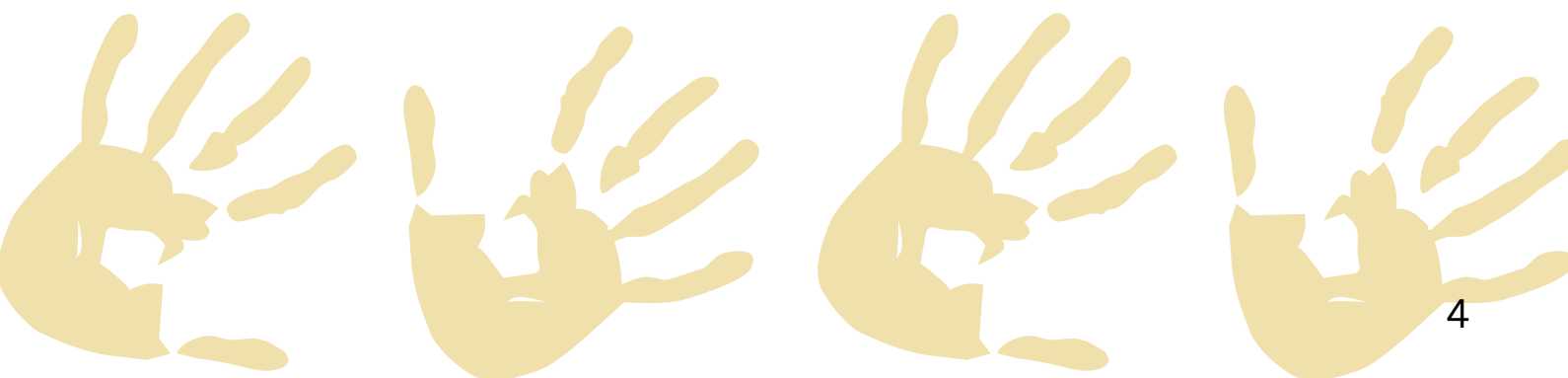
4 Analisis Hukum dan Penyusunan Kesimpulan Sementara

Setelah semua bukti terkumpul, tim investigasi perlu melakukan analisis hukum atas temuan-temuan tersebut. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap apakah tindakan kekerasan yang dilaporkan memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti penganiayaan fisik, pelecehan seksual, atau kekerasan psikologis. Pihak kampus juga harus meninjau apakah tindakan tersebut melanggar peraturan internal kampus.

Tim investigasi harus mempertimbangkan setiap elemen kekerasan secara objektif, termasuk tingkat keseriusan insiden, motif yang mungkin ada di balik tindakan kekerasan, serta dampaknya terhadap korban. Jika ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa tindak kekerasan telah terjadi, tim harus menyusun kesimpulan sementara yang kemudian akan dibahas lebih lanjut oleh pihak terkait.

Kesimpulan sementara ini perlu mencakup rekomendasi tindakan selanjutnya, baik tindakan administratif di tingkat kampus maupun rekomendasi untuk membawa kasus ini ke jalur hukum pidana. Dalam hal ini, tim investigasi harus bekerja sama dengan bagian hukum kampus untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diajukan sejalan dengan prosedur hukum yang berlaku.

Setelah kesimpulan sementara disusun, pihak yang terlibat dalam kasus, termasuk korban dan pelaku, perlu diberitahu secara transparan tentang hasil sementara investigasi. Namun, pada tahap ini, penting untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan akhir tanpa pertimbangan matang.



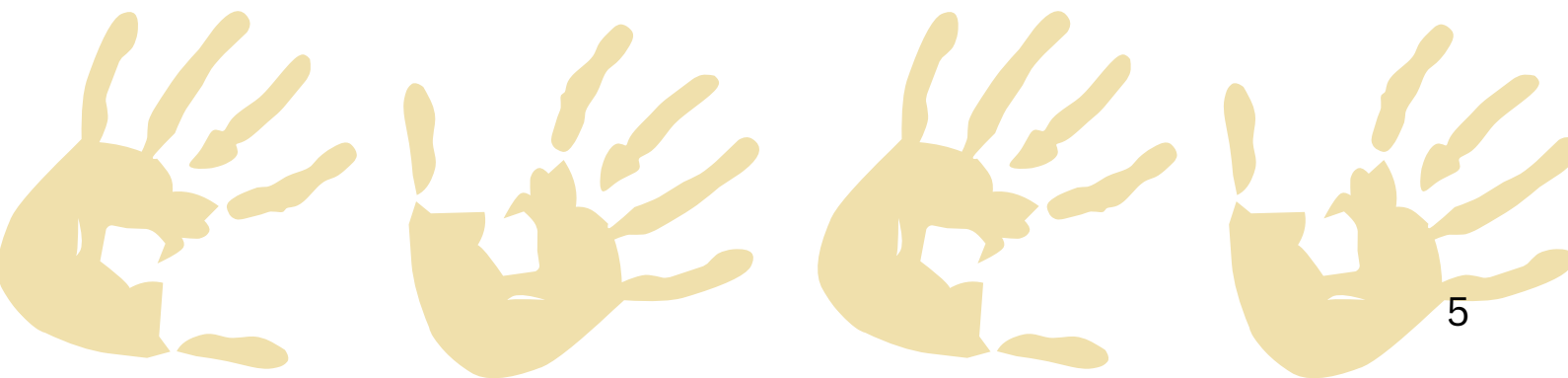
5 Penyusunan Laporan Resmi dan Rekomendasi

Hasil dari investigasi harus dituangkan dalam laporan resmi yang mendokumentasikan semua temuan, bukti, kesaksian, dan analisis hukum yang telah dilakukan. Laporan ini perlu disusun secara sistematis dan jelas agar dapat menjadi panduan bagi pihak kampus maupun pihak penegak hukum jika kasus ini dibawa ke ranah pidana. Dalam menyusun laporan, tim investigasi harus memastikan bahwa semua fakta yang relevan telah dicantumkan secara objektif.

Selain itu, laporan juga harus menyertakan rekomendasi langkah selanjutnya, baik terkait sanksi administratif bagi pelaku maupun perlindungan bagi korban. Rekomendasi tersebut harus didasarkan pada analisis yang komprehensif dan sesuai dengan peraturan kampus serta hukum yang berlaku. Dalam beberapa kasus, tim investigasi mungkin juga merekomendasikan intervensi psikologis atau mediasi antara pihak-pihak yang terlibat.

Penyusunan laporan resmi ini juga harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Jika laporan ini akan dipublikasikan atau disampaikan kepada pihak luar, seperti aparat penegak hukum atau organisasi advokasi, penting untuk menjaga kerahasiaan informasi sensitif yang dapat merugikan korban atau saksi.

Setelah laporan selesai disusun, perlu ada prosedur untuk meninjau dan menyetujui laporan tersebut oleh otoritas kampus yang berwenang. Hal ini penting agar laporan tersebut dianggap sah dan dapat dijadikan dasar untuk tindakan lebih lanjut, baik di tingkat kampus maupun dalam konteks hukum yang lebih luas.



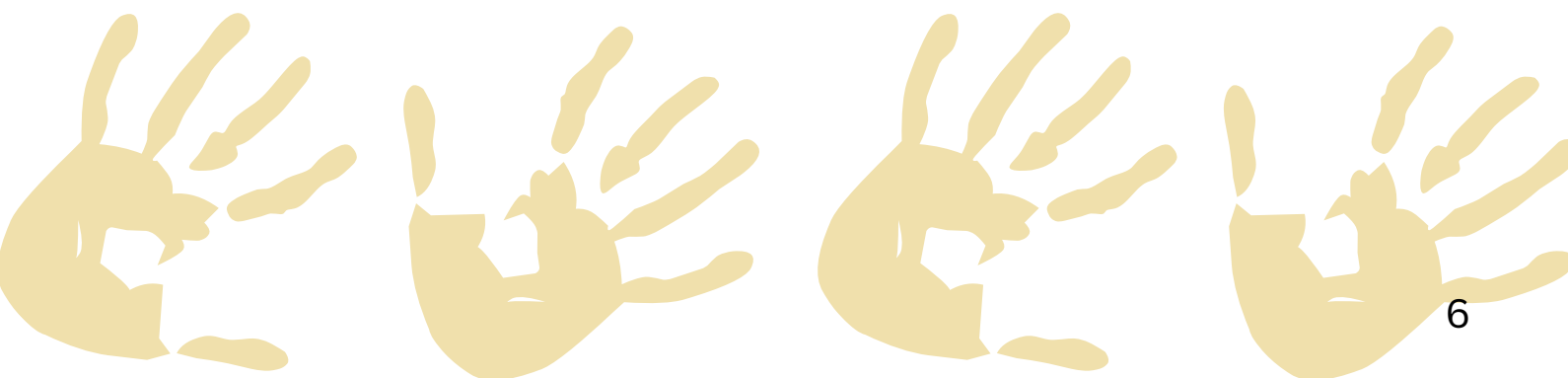
6 Tindak Lanjut Administratif di Tingkat Kampus

Setelah laporan resmi disetujui, langkah berikutnya adalah menjalankan tindak lanjut administratif di tingkat kampus. Hal ini bisa berupa pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan, seperti skorsing, pemberhentian sementara, atau pengusiran dari kampus, tergantung pada beratnya pelanggaran. Keputusan ini harus berdasarkan bukti dan analisis hukum yang sudah dilakukan sebelumnya.

Selain itu, kampus perlu mempertimbangkan langkah-langkah untuk melindungi korban dari potensi ancaman atau tindakan balasan dari pelaku. Perlindungan ini dapat berupa pendampingan psikologis, perlindungan keamanan, atau bahkan pengaturan ulang jadwal akademik agar korban dan pelaku tidak berinteraksi lebih lanjut.

Tindak lanjut administratif ini juga harus sesuai dengan ketentuan dalam kebijakan kampus mengenai disiplin dan perlindungan mahasiswa. Jika pelaku adalah seorang dosen atau staf, kampus harus menerapkan prosedur disiplin yang berlaku untuk pegawai, termasuk peninjauan kinerja dan potensi pemberhentian.

Transparansi dalam pelaksanaan sanksi juga penting untuk menjaga kepercayaan seluruh civitas akademika terhadap sistem hukum di kampus. Namun, tetap harus diperhatikan aspek kerahasiaan dan hak privasi semua pihak yang terlibat.



Bacaan lebih lanjut

Berikut adalah 7 referensi yang dapat digunakan untuk memahami proses investigasi laporan kekerasan di kampus, mencakup pedoman, pendekatan hukum, serta praktik terbaik dalam menangani kasus-kasus kekerasan:

National Institute of Justice (NIJ) - "Campus Sexual Assault: A Guide for Investigators"

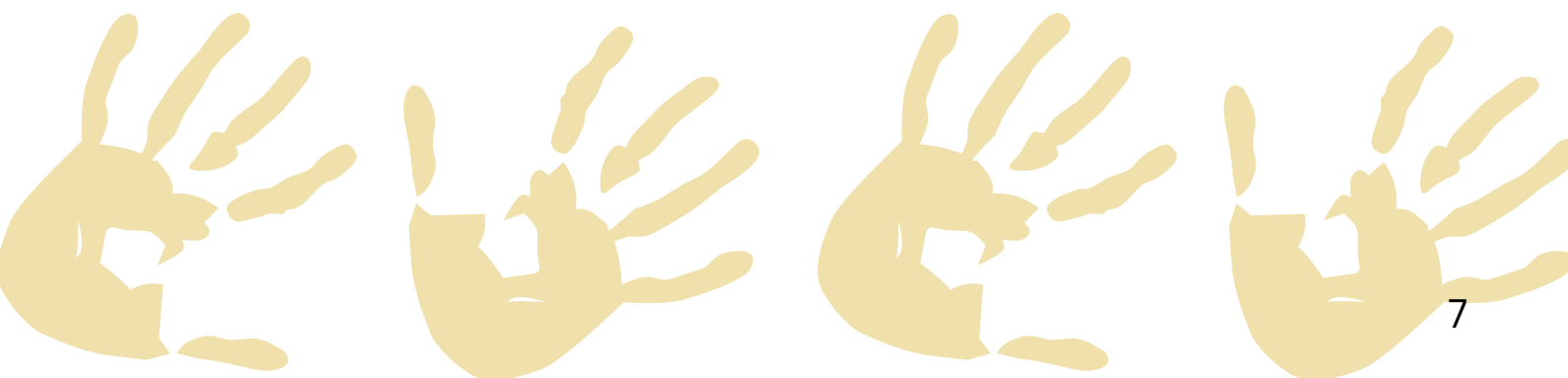
Panduan ini berisi prosedur investigasi yang disarankan untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Diterbitkan oleh NIJ, dokumen ini memberikan pedoman tentang cara mengumpulkan bukti, wawancara korban dan saksi, serta aspek perlindungan hukum yang perlu diterapkan dalam penyelidikan kasus kekerasan di kampus.- URL: <https://nij.ojp.gov>

U.S. Department of Education - "Title IX and Campus Sexual Violence: Policy and Investigation Guidelines"

Dokumen ini menguraikan pedoman dan peraturan yang berkaitan dengan Title IX di Amerika Serikat, yang berkaitan dengan diskriminasi berbasis gender dan kekerasan seksual di kampus. Panduan ini juga mencakup cara kampus harus menangani laporan kekerasan, proses investigasi yang adil, dan tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak-hak semua pihak. - URL: <https://www.ed.gov>

UN Women - "Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence"

Laporan ini memberikan pendekatan komprehensif terhadap investigasi kasus kekerasan terhadap perempuan di berbagai institusi, termasuk kampus. UN Women menawarkan panduan tentang layanan esensial, termasuk penyelidikan yang berfokus pada korban dan bagaimana menjaga keamanan serta keadilan selama proses investigasi.- URL: <https://www.unwomen.org>



Australian Human Rights Commission - "Change the Course: National Report on Sexual Assault and Sexual Harassment at Australian Universities"

Laporan ini memberikan gambaran tentang investigasi kasus kekerasan seksual dan pelecehan di kampus universitas di Australia. Ini mencakup rekomendasi untuk investigasi yang efektif dan berpusat pada korban, serta peran penting kebijakan universitas dalam menangani laporan kekerasan. - URL:

<https://www.humanrights.gov.au>

"Handbook for Campus Safety and Security Reporting" by the U.S. Department of Education

Buku panduan ini memberikan pedoman tentang bagaimana institusi pendidikan tinggi harus melaporkan dan menyelidiki insiden kejahatan, termasuk kekerasan. Ini mencakup langkah-langkah yang harus diambil oleh kampus untuk mengumpulkan data, menangani laporan, dan memastikan transparansi dalam pelaporan. - URL: <https://www.clerycenter.org>

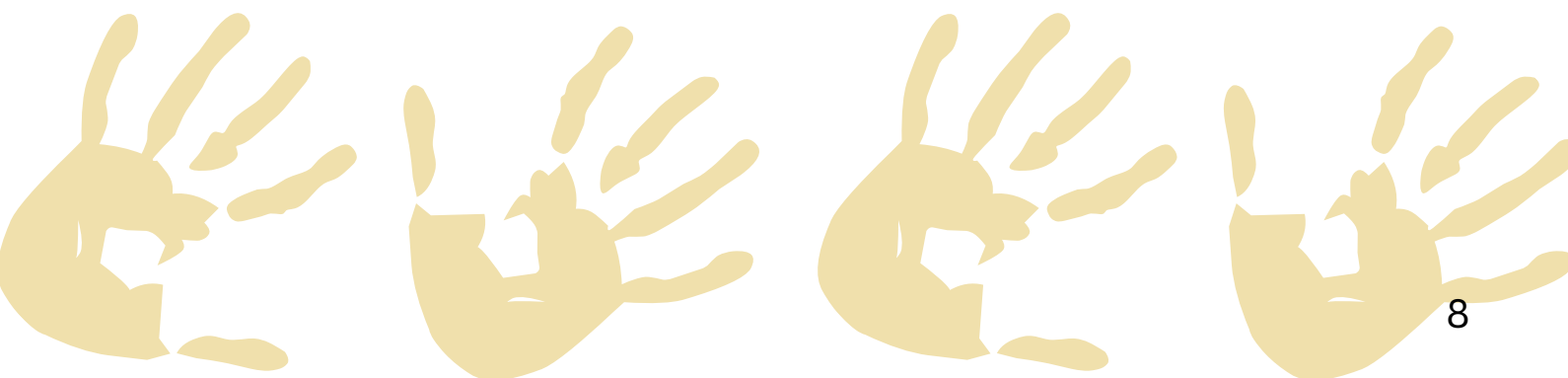
Campus Policing: The Role of Law Enforcement in University Investigations" by International Association of Campus Law Enforcement Administrators (IACLEA)

Laporan ini fokus pada peran polisi kampus dalam melakukan investigasi atas laporan kekerasan, terutama kekerasan seksual. Laporan ini membahas metode penyelidikan, kolaborasi dengan penegak hukum lokal, serta teknik investigasi yang menghormati hak korban dan tersangka - URL: <https://www.iaclea.org>

"Investigating Allegations of Sexual Harassment and Assault in Higher Education" by The American Council on Education (ACE)

Laporan ini memberikan panduan praktis bagi perguruan tinggi dan universitas dalam melakukan investigasi internal atas laporan pelecehan seksual dan kekerasan. Laporan ini menekankan pentingnya kebijakan yang jelas, investigasi yang adil dan transparan, serta prosedur yang konsisten.- URL: <https://www.acenet.edu>

Referensi-referensi ini menawarkan perspektif beragam tentang bagaimana mengelola investigasi laporan kekerasan di lingkungan kampus, dengan fokus pada perlindungan korban, transparansi proses, dan kepatuhan terhadap hukum.



Ending violence requires all of us working together to build futures that are just and free of violence.

